

KAWASAN MALIOBORO PUSAT EKONOMI RAKYAT HARMONIS Relokasi PKL, Kerja Sama dengan UNESCO

YOGYA (KR) - Pemda DIY terus mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung terkait dengan rencana relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Malioboro. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta para PKL yang akan direlokasi untuk memahami rencana tersebut. Mengingat relokasi PKL itu telah lama direncanakan.

Di mana salah satu tujuannya adalah ingin mewujudkan rencana kerja sama dengan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) berkaitan dengan sumbu filosofi. Yaitu mendukung pengusulan sumbu filosofis sebagai warisan budaya dunia versi UNESCO.

"Kita ingin membangun kerja sama dengan UNESCO untuk sumbu filosofisnya. Jadi PKL akan kami beri ruang, kami tata dan kami kan juga harus membangun eks bioskop Indra untuk tahap kedua di sebelah utara," kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Kamis (2/12).

Sultan mengatakan, lokasi baru untuk para pedagang (PKL) ada di kawasan Malioboro akan representatif. Bahkan dengan dilakukan relokasi PKL Malioboro justru mendapatkan ruang yang sudah ditata oleh Pemda DIY. Rencananya relokasi

PKL tersebut akan dilakukan secara bertahap mulai Januari 2022. Nantinya, pedagang akan dipindah ke eks Bioskop Indra dan eks gedung Dinas Pariwisata DIY. Meski begitu dirinya memastikan bahwa PKL yang direlokasi ditempatkan di dalam kawasan Malioboro.

Sementara itu saat dimintai soal adanya penolakan dari PKL terkait dengan relokasi tersebut. Sultan meminta masyarakat memahami bahwa selama ini selasar yang digunakan PKL berjualan merupakan milik pemilik toko sehingga upaya penataan perlu dilakukan.

"Saya kira mereka juga harus tahu sebenarnya tempat jualan PKL itu milik pemilik toko bukan milik Pemda. Karena Pemda kan trotoarnya sudah untuk jalur lambat," ujarnya.

Presidium Paguyuban Kawasan Malioboro Sujarwo Putra mengungkapkan kawasan Malioboro adalah pusat ekonomi rakyat yang harmonis

dimana hidup berdampingan dan saling melengkapi antara ekonomi rakyat, baik PKL, andong, becak, dan lainnya dengan pengusaha dan pemodal besar. Hal ini justru merupakan wujud sebenarnya kawasan Malioboro merupakan ciri khas dan keistimewaan pembangunan di DIY. Pembangunan yang manusiawi dan memberi peluang secara sejajar bagi ekonomi rakyat untuk berpartisipasi dan menikmati buah manisnya di dalam suatu kawasan legendaris yang menjadi bagian dari sumbu filosofi.

"Jika PKL di kawasan Malioboro direlokasi guna mendukung sumbu filosofi yang tengah diajukan sebagai warisan budaya dunia ke UNESCO atau ingin menjadi kawasan pedestrian seperti di Singapura maka kenyataan tersebut jauh dari mengherankan. Sebab, pembangunan di Yogyakarta dibangun dalam spirit tahta untuk rakyat dimana kekuasaan yang diabdikan sepenuhnya bagi kesejahteraan rakyat dan teristimewa rakyat kecil yang tidak lain adalah PKL," paparnya.

Sujarwo menyebut wajah Malioboro yang demikian telah menjadi daya tarik wisatawan nasional maupun mancanegara. **(Ria/Ira)-f**

GELAR MACAPAT DISBUD DIY 'Pengarep-arep' Covid Cepat Berakhir



KR-Isnawan

Gelar Macapat di Pendapa Dinas Kebudayaan DIY.

SELAMA dua hari, Seksi Bahasa dan Sastra Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY menyelenggarakan acara Gelar Macapat di Pendapa Dinas Kebudayaan (Disbud) DIY dan ditayangkan secara *live streaming* melalui kanal YouTube Dinas Kebudayaan DIY: *tasteofjogja disbud diy*. Acara ini didanai dengan Dana Keistimewaan.

Pada hari pertama, Rabu (1/12) pukul 19.30, Gelar Macapat menampilkan kelompok macapat masyarakat umum perwakilan dari kabupaten dan kota dengan narasumber KMT Projo-suwasono dan Nyi MB Penilaras dipandu pembawa acara Uut Salsabila.

Sedangkan hari kedua, Kamis (2/12) pukul 19.30, Gelar Macapat menampilkan macapat dari kalangan generasi muda dengan narasumber M Ng Citropanambang, Nyi MT Setrorukmi dipandu pembawa acara Gilang Sanjaya.

Seni macapat menarik diikuti karena kalimat macapat sarat dengan makna. Dalam Gelar Macapat, setiap kalimat disertai dengan



KR-Isnawan

Tri Agus Nugroho.

kupasan apa yang terkandung dalam kalimat macapat.

Kabid Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permusuman, Tri Agus Nugroho SSos MSi mengatakan, Gelar Macapat yang diselenggarakan secara hybrid dengan peserta terbatas di masa pandemi Covid-19 ini disertai *pengarep-arep* atau harapan, agar Covid-19 cepat berakhir dan masyarakat bisa beraktivitas seperti se-

diakala. Selain itu Gelar Macapat ini untuk melestarikan dan mengembangkan macapat.

Menurut Agus, penyelenggaraan Gelar Macapat selama dua hari dengan melibatkan kelompok macapat perwakilan dari kabupaten dan kota serta generasi muda, dimaksudkan agar ada kesinambungan sehingga pelestarian macapat bisa terjaga. "Jadi di satu sisi melestarikan, di sisi lain mewariskan kepada generasi selanjutnya," kata Agus.

Gelar Macapat ini, lanjut Agus, juga untuk memberikan ruang pada kelompok macapat berapresiasi sekaligus unjuk kebolehan dalam macapat. Selanjutnya Gelar Macapat ini menjadi agenda rutin tiap tahun. "Tapi karena tahun ini masih dalam masa pandemi, sehingga dilaksanakan secara hybrid, tidak bisa massal," kata Agus.

Gelar Macapat, menurut Agus, sekaligus untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka yang melestarikan macapat diberikan ruang oleh pemerintah melalui Dinas Kebudayaan DIY. **(Wan)-f**

Tanah Eks Indra Masih Berperkara di MA

YOGYA (KR) - Terkait rencana relokasi PKL Malioboro ke Gedung eks Bioskop Indra di awal tahun 2022, seperti diberitakan KR Rabu (1/12), Sukrisno W dkk yang menyatakan selaku eks pemilik Bioskop Indra mengajukan keberatan. Palsalnya status lahan eks Bioskop Indra sampai saat ini masih dalam perkara di Mahkamah Agung (MA) dan belum selesai.

"Perkara gugatan di PTUN dari pihak Sukrisno W dkk terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang (Kepala BPN) terkait pemberian Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan kepada Pemda DIY dan Penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan No. 001/Ngupasan atas nama

Pemda DIY masih berlangsung hingga saat ini. Dimana pihak Pemda DIY melibatkan diri sebagai Tergugat Intervensi," tegas Sukrisno.

Sukrisno mengingatkan gugatan di tingkat PTUN dimenangkan pihak Sukrisno W dkk, sesuai dengan semua bukti-bukti dan saksi di persidangan. "Naik di PT-TUN dimenangkan juga oleh pihak Sukrisno W, dkk, hingga Kasasi di MA dimenangkan pihak Sukrisno W, dkk," jelasnya

Selanjutnya Peninjauan Kembali Mahkamah Agung memutuskan NO namun menurut Sukrisno mengandung 'cacat formal'. "Oleh karenanya masih menjadi perkara, berupa per-

mohonan penguatan kembali Putusan Kasasi MA, dan hingga saat ini belum ada keputusan," tegas Sukrisno

Untuk itu pihak Sukrisno W dkk meminta agar semua pihak menghormati hukum, dan menunggu keputusan MA, serta tidak melakukan penggunaan fisik terhadap eks kompleks Bioskop Indra, sebelum putusan MA selesai.

"Terkait pemindahan lokasi PKL, ke eks Bioskop Indra, akan sangat membebani para PKL, apabila MA nantinya memenangkan pihak Sukrisno W dkk dan PKL harus memindahkan kembali dagangannya ke area semula," cetus Sukrisno.

(Vin)-f

SE PERAYAAN NATAL DI MASA PANDEMI

Menag: Rumah Ibadah Harus Jadi Contoh

JAKARTA (KR) - Kementerian Agama telah menerbitkan Surat Edaran mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada Perayaan Natal Tahun 2021. Panduan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama No SE 31 Tahun 2021 yang ditandatangani Menag Yaqut Cholil Qoumas pada 29 November 2021.

Menurut Menag, kesehatan dan keselamatan seluruh warga negara Indonesia merupakan prioritas utama yang wajib dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan penyelenggaraan kegiatan ibadah dan perayaan Natal di masa pandemi Covid-19.

Panduan diterbitkan dalam rangka mencegah, menanggulangi, dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di gereja sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman

kepada masyarakat dalam perayaan Natal Tahun 2021.

"Surat Edaran diterbitkan sebagai panduan umat Kristiani yang akan menyelenggarakan ibadah dan perayaan Natal di rumah ibadah masing-masing dengan tetap menaati protokol kesehatan, terutama dalam rangka pencegahan persebaran Covid-19 dan perlindungan masyarakat dari risiko ancaman dampaknya," terang Menag di Jakarta, Kamis (2/12).

Dikatakan, upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di tempat ibadah pada saat Natal 2021 harus dilakukan. Semua mesti waspada, terlebih dengan munculnya varian baru Omicron di sejumlah negara. "Rumah ibadah harus menjadi contoh terbaik dalam upaya pencegahan persebaran Covid-19," lanjutnya.

Menag menegaskan, pelaksanaan kegiatan keagamaan inti dan perayaan Natal di rumah ibadah, harus dilakukan sesuai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3.

Di Yogyakarta, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, sesuai aturan dari Pemerintah Pusat, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemda DIY dilarang mengambil cuti dan berlibur saat Natal dan Tahun Baru (Nataru), dalam upaya mengendalian penularan Covid-19 saat momentum Nataru.

ASN di DIY juga tidak boleh meninggalkan daerah tanpa mendapatkan izin dari pejabat. "Larangan cuti bagi ASN tetap berlaku dalam Natal dan tahun baru kali ini. Kami pun tidak bisa ke luar negeri, begitu pula untuk ke luar provinsi harus

tetap ada izin. Jadi saya minta kepada para ASN untuk mentaati aturan yang sudah ada dengan sebaik-baiknya," kata Sultan HB X di Kepatihan.

Menurut Sultan, bagi ASN yang terbukti melakukan pelanggaran bisa dikenai sanksi. Sedangkan jenis sanksinya disesuaikan kesalahan. Sementara untuk melakukan pengawasan terhadap ASN selama Nataru, Sultan mengakui bukan sesuatu yang mudah. Untuk itu pihaknya berharap kepala dinas bisa melakukan pengawasan kepada jajarannya.

"Memang untuk pengawasan tidak mudah. *Mosok* ASN sebanyak 1.000 orang *ditutke ning ngendi-endi*. Tanggung jawab kepala dinas, apalagi mereka (ASN) setiap hari juga harus presensi," ucap Sultan.

(Ati/Ria/Ira)-f

PERATURAN PELAKSANAAN KLASTER KETENAGAKERJAAN Menaker: Terbit Sebelum Putusan MK

JAKARTA (KR) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, peraturan pelaksanaan klaster ketenagakerjaan yang menjadi mandat Undang Undang Cipta Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi (MK) diumumkan. Karenanya, proses pengambilan kebijakan ketenagakerjaan saat ini harus tunduk pada aturan tersebut, tidak terkecuali mengenai pengupahan.

"Jadi, dengan dinyatakannya masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, sebagaimana yang telah disampaikan Bapak Presiden beberapa waktu lalu, seluruh materi dan substansi serta aturan sepe-nuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan oleh MK. Atas dasar itu, berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah ada saat ini, termasuk pengaturan tentang pengupahan masih tetap berlaku," jelas Ida di Jakarta, Kamis (2/12).

Karena itu pula, lanjutnya, pihaknya kembali meminta kepada semua pihak khususnya para Kepala Daerah untuk mengikuti ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP 36/2021. "Saya juga mengingatkan bahwa dalam PP tersebut tidak hanya mengatur tentang upah minimum saja, tetapi juga terkandung

aturan struktur dan skala upah yang harus diimplementasikan oleh pengusaha," tegasnya.

Ida menambahkan, terkait upah minimum, merupakan instrumen jaring pengaman bagi pekerja/buruh yang tidak boleh dibayarkan upah/gajinya di bawah nilai UM yang berlaku pada satu wilayah. UM juga hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja maksimal 12 bulan.

Dalam pelaksanaannya, UM Provinsi atau UMP ditetapkan oleh gubernur setiap tahunnya. Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan catatan rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dalam tiga tahun terakhir, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi, atau nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota yang bersangkutan selama tiga tahun terakhir selalu positif dan lebih tinggi dari provinsi.

Selanjutnya, dalam penetapan UMK, gubernur dapat meminta pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi. UMK tersebut ditetapkan setelah UMP ditetapkan dan harus lebih tinggi dari UMP. Jika syarat tidak terpenuhi, maka gubernur tidak dapat menetapkan UMK.

(Ful)-f

DIGUNAKAN PADA PEMILU 2024

KPU Simulasikan 2 Jenis Surat Suara

JAKARTA (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan simulasi pengumutan dan penghitungan suara di Bali, Kamis (2/12). Simulasi ini menggunakan dua jenis surat suara, yaitu model satu lembar dan model tiga lembar untuk lima jenis pemilihan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Anggota KPU Arief Budiman berharap, pada penyelenggaraan simulasi tersebut, seluruh anggota KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang baru nanti dapat memiliki formula tepat untuk Pemilu 2024. "Bagian akhir dari seluruh proses ini mudah-mudahan KPU dan Bawaslu yang baru nanti bisa punya formula tepat, karena proses ini panjang, sampai diputuskan di 2024 nanti ada desain yang sangat efektif dan efisien," kata Arief Budiman, kemarin.

Pada awalnya, lanjut Arief, KPU memiliki enam model desain besar terkait surat suara untuk Pemilu 2024 yang meliputi jenis pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, pemilihan anggota DPD, pemilihan anggota DPRD provinsi serta pemilihan anggota DPRD kabupaten dan kota. "Kemudian melalui beberapa pembahasan akhirnya mengerucut di tiga model, termasuk di Bali ini, kami akan menyimulasikan model satu dan model tiga, di Sulawesi Utara kemarin (simulasi) model dua dan model tiga," jelasnya. **(Ant)-d**



KR-Antara/Aloysius Jarot Nugroho

REVITALISASI RAWA JOMBOR: Sejumlah pekerja membongkar bagian warung apung dengan alat berat di Rawa Jombor, Klaten, Jawa Tengah, Kamis (2/12). Pembongkaran warung apung itu merupakan tindak lanjut revitalisasi dan pengembangan kawasan wisata Rawa Jombor.